

**PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2016-2024**

Riska Putri Dinarti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
riskarpd028@gmail.com

Joko Priyono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
jokopriyono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Probolinggo selama periode 2016-2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta dianalisis menggunakan metode regresi berganda dengan variabel dependen Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan rasio kemandirian, sedangkan Belanja Daerah dan PAD sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Belanja Daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Probolinggo, namun secara parsial Belanja Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat memperkuat tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara besarnya Belanja Daerah tidak selalu berdampak pada peningkatan kinerja keuangan apabila tidak didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Kemandirian Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur serta mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri. Kinerja keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan sekaligus melaksanakan pembangunan daerah. Secara umum, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mencerminkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemampuan pemerintah

daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Selain itu, Belanja Daerah juga memiliki peran yang penting karena menggambarkan alokasi anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di Kabupaten Probolinggo, kinerja keuangan pemerintah daerah memperoleh apresiasi karena dinilai mampu mengelola keuangan dengan baik dalam beberapa periode. Namun demikian, lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masih menyampaikan kekhawatiran dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan Belanja Daerah yang lebih efektif masih tetap diperlukan.

Tabel 1. 1 Target Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo 2020-2024

Tahun	APBD Kabupaten Probolinggo		
	Target Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	(%)
2020	2.484,14	2.302,24	92.68
2021	2.513,85	2.234,95	88.91
2022	2.454,51	2.343,43	95.47
2023	2.359,88	2.235,23	94.72
2024	2.715,64	2.570,94	94.67

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada tabel 1,1 menunjukkan Realisasi belanja daerah Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat realisasi belanja menurun cukup signifikan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penyesuaian anggaran, refocusing kegiatan, serta penundaan sejumlah program pembangunan sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai target. Memasuki tahun 2022, realisasi belanja meningkat yang mencerminkan mulai pulihnya aktivitas pembangunan daerah, membaiknya kondisi ekonomi, serta semakin optimalnya pelaksanaan program pemerintah. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 persentase realisasi kembali mengalami sedikit penurunan. Meskipun demikian, secara nominal nilai realisasi belanja pada tahun 2024 menjadi yang tertinggi selama periode pengamatan, menunjukkan bahwa kapasitas belanja daerah terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan pendanaan pembangunan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan adanya proses penyesuaian dan pemulihan pengelolaan keuangan daerah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi serta tuntutan pembangunan yang terus berkembang.

Tabel 1. 2 Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Tahun	APDB Kabupaten Probolinggo		
	Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah	(%)
2020	244,68	254,88	104.17
2021	241,65	300,40	124.31
2022	257,74	261,45	101.44
2023	255,62	264,78	103.58
2024	336,08	348,71	103.76

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada data tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang positif, ditandai dengan realisasi pendapatan yang setiap tahunnya mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya. Capaian yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2021 ketika realisasi PAD melampaui target secara signifikan meskipun perekonomian masih terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada periode 2022–2024, realisasi PAD menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi dan pengembangan potensi pendapatan asli daerah.

Jika dibandingkan dengan belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo masih memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pembiayaan daerah karena nilai realisasinya jauh di bawah total belanja daerah yang mencapai lebih dari Rp2 triliun setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja PAD tergolong baik karena selalu melampaui target yang ditetapkan, perannya dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah masih terbatas. Oleh sebab itu, pengelolaan belanja daerah yang efektif serta optimalisasi PAD menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah di berbagai wilayah dengan hasil yang beragam. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan periode pengamatan yang relatif singkat, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika kinerja keuangan daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus menganalisis Kabupaten Probolinggo dengan memanfaatkan data terbaru yang mencakup periode sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi, hingga periode pemulihan ekonomi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh belanja daerah dan PAD terhadap kinerja keuangan daerah pada berbagai kondisi ekonomi yang berbeda.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan publik merupakan landasan dalam memahami pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan dan belanja daerah. Teori ini menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan publik menekankan optimalisasi sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi wilayah seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu, dalam belanja daerah, keuangan publik menjelaskan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, keuangan publik menjadi dasar dalam melihat keterkaitan antara PAD, belanja daerah, dan kinerja keuangan daerah (Gruber, 2018 dalam Biswan, 2022; Haryanto, 2014).

Teori desentralisasi fiskal digunakan untuk menjelaskan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini. Menurut Oates (2005), desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri karena dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan PAD melalui penggalan potensi daerah secara lebih efektif (Oates, 2005; UU No. 23 Tahun 2014).

Sementara itu, teori stewardship digunakan untuk menjelaskan pengelolaan belanja daerah. Teori ini memandang bahwa pemerintah daerah sebagai steward akan bertindak untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Menurut Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997), steward memiliki motivasi intrinsik seperti tanggung jawab, pencapaian, dan aktualisasi diri sehingga cenderung berorientasi pada keberhasilan organisasi. Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah yang optimal menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997; Haryanto, 2014).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan paradigma positivisme untuk menguji hubungan antar variabel Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Probolinggo melalui analisis statistik. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur rasio kemandirian daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk runtut waktu (time series) tahunan selama periode 2016–2024. Seluruh data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui laporan realisasi APBD

Kabupaten Probolinggo yang mencakup data Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah, serta data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS, serta dilengkapi dengan uji t untuk menguji pengaruh parsial, uji F untuk menguji pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan belanja daerah (X2) terhadap kinerja keuangan daerah (Y) secara sistematis dan terukur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Tabel 1 Persamaan Regresi Berganda Data Time Series
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	13.456	.414		32.531	.000
Belanja_Daerah	-.027	.054	-.101	-.507	.630
Pendapatan Asli Daerah	.088	.020	.892	4.473	.004

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang terbentuk yaitu :

$$\text{Kinerja Keuangan} = 13.456 - 0.027 \text{ Belanja Daerah} + 0.088 \text{ Pendapatan Asli Daerah}$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 13,456 mengindikasikan nilai kinerja keuangan daerah ketika realisasi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap konstan. Variabel belanja daerah memiliki koefisien negatif sebesar -0,027 yang berarti setiap peningkatan belanja daerah justru menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,027 satuan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya efisien dan belum optimal sesuai prinsip teori stewardship (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997), serta sejalan dengan penelitian Amanda dan Praptoyo (2023) dan Saputri (2020) yang menemukan hasil serupa. Sebaliknya, PAD memiliki koefisien positif sebesar 0,088 yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan daerah, sehingga semakin tinggi kemandirian fiskal daerah maka semakin baik kinerja keuangannya, sesuai dengan konsep desentralisasi fiskal serta didukung oleh penelitian Okadri (2025), Maghfiroh (2024), dan Setiari (2025). Dengan demikian, PAD berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja daerah memberikan pengaruh negatif meskipun relatif kecil.

Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 2 Uji F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21.826	2	10.913	10.077	.012 ^b
Residual	6.498	6	1.083		
Total	28.324	8			

Hasil pengujian hipotesis melalui uji F (simultan) menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, dengan nilai F hitung sebesar 10,077 dan signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, serta menunjukkan bahwa perubahan Belanja Daerah dan PAD secara simultan mampu memengaruhi Kinerja Keuangan selama periode penelitian. Temuan ini sejalan dengan Teori Keuangan Publik yang menekankan bahwa kinerja keuangan daerah ditentukan oleh keseimbangan antara pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, di mana PAD berperan sebagai penguat kapasitas fiskal daerah dan belanja daerah mencerminkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Okadri (2025), Setiari (2025), Amanda dan Praptoyo (2023), serta Saputri (2020) yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, meskipun secara parsial pengaruh masing-masing variabel dapat berbeda, secara keseluruhan Belanja Daerah dan PAD tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan Kinerja Keuangan sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

Uji Parsial (Uji T)

Sesuai dengan tabel 1, Hasil uji t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kinerja Keuangan daerah. Variabel Belanja Daerah (X_1) memperoleh nilai t hitung sebesar -0,507 dengan signifikansi 0,630 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan meskipun koefisien regresi bernilai negatif yang mengindikasikan kecenderungan penurunan kinerja, namun secara statistik tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis parsial (H_2) ditolak. Sementara itu, variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,473 dengan signifikansi 0,004 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, di mana peningkatan PAD mampu meningkatkan Kinerja Keuangan daerah, sehingga hipotesis parsial (H_3) diterima.

Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	.694	1.04065

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,878 yang mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan. Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,771 menunjukkan bahwa sebesar 77,1% variasi Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Setelah dilakukan penyesuaian, nilai Adjusted R Square sebesar 0,694 menunjukkan bahwa kontribusi Belanja Daerah dan PAD dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan menjadi sebesar 69,4%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki hubungan yang kuat serta kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan Kinerja Keuangan Kabupaten Probolinggo, sehingga model penelitian dinilai layak dan memadai untuk digunakan dalam analisis pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen.

E. KESIMPULAN

1. Belanja Daerah dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Probolinggo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan, sehingga pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Probolinggo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, yang berarti besarnya belanja belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan, sehingga efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Probolinggo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, yang berarti peningkatan PAD mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah, sehingga optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

- Biswan, A. T. (2022). *Keuangan Publik: Teori dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik* (P. Fitriandi, Ed.). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Davis, J. H., David Schoorman, F., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://about.jstor.org/terms>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (n.d.). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)*. Retrieved March 11, 2026, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Dr Akhmad, S. E. , M. S. (2019). *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH*. Azkiya Publishing.
- Fatmawatie, H. N. (2016). *OTONOMI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH*. STAIN Kediri Press.
- Fikri, N. A. (2020). *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG*. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Maghfiroh, T. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023*.
- Oates, W. E. (2005). Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. In *International Tax and Public Finance* (Vol. 12).
- Okadri, A. S., & Yentisna. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 13 (2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , 8 (2011).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. 71 (2010).
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). *Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia* (Vol. 6).
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rizkita, D. O. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia*. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/39202>

- Saputri, S. H. (2020). *PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH.*
- Setiari, B. K. (2025). *PENGARUH PEDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020-2024.*
- Siktania, M., Dilliana, S., Akun, M., Si, A., & Henrikus Herdi, A. (2022). *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA* (Dwi Warni, Ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.
- STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO.2 (2005).
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 12 (2019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. 23 (2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. 23 (2014).
- Victor, H., Dewi Ungkari, M., Shofiatul Mila, C., Anny Riwayati, A., Kartika Rachma Sari, Ms., Aris Suko Wibowo, A., & Khariidatul Bahiyyah, S. (2024). *BUKU AJAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com